

DEFORESTASI SEBAGAI DAMPAK MODERNISASI DI TAMIANG : STUDI EKOTEOLOGIS

Fitriani, Syahrin Harahap, Elly Warnisyah Harahap, Dahlia Lubis, Husna Sari Siregar
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

fitriani@uinsu.ac.id, syabrinharahap@uinsu.ac.id, elhywarnisyahharahap@uinsu.ac.id, dabliialubis@uinsu.ac.id
busnasari@uinsu.ac.id

Abstrak

Deforestasi di Kabupaten Aceh Tamiang telah menjadi masalah lingkungan yang serius akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas industri yang didorong oleh gelombang modernisasi. Hilangnya tutupan hutan primer dan sekunder tidak hanya menyebabkan erosi tanah, banjir berulang, serta penurunan biodiversitas, tetapi juga memicu konflik lahan dan kemiskinan masyarakat adat yang bergantung pada hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara modernisasi dan deforestasi di Tamiang, mengkaji fenomena tersebut melalui pendekatan ekoteologi, serta merumuskan kontribusi nilai-nilai teologis Islam terhadap upaya pelestarian lingkungan. Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan ekoteologis dan sosiologis, mengandalkan teknik studi pustaka (Al-Qur'an, jurnal, dan berita terkini). Kerangka teori utama yang digunakan adalah ekoteologi Islam, dengan prinsip-prinsip khalifah (wakil Tuhan di bumi), amanah, mizan (keseimbangan), dan rahmatan lil 'alamin sebagai landasan analisis. Temuan utama menunjukkan bahwa modernisasi telah mempercepat deforestasi melalui logika ekonomi yang mengutamakan keuntungan jangka pendek, sementara perspektif ekoteologi mengungkap deforestasi sebagai krisis moral dan spiritual akibat penyimpangan peran manusia sebagai khalifah. Implikasi teoretis penelitian ini memperkaya kajian ekoteologi kontekstual di Indonesia, sedangkan implikasi praktis memberikan rekomendasi etika lingkungan berbasis agama bagi masyarakat serta masukan kebijakan untuk integrasi nilai teologis dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di wilayah berbasis keagamaan.

Kata Kunci: *Aceh Tamiang, Deforestasi, Ekoteologis.*

Abstract

Deforestation in Aceh Tamiang Regency has become a serious environmental issue driven by the expansion of oil palm plantations, infrastructure development, and industrial activities fueled by waves of modernization. The loss of primary and secondary forest cover has not only caused soil erosion, recurrent flooding, and a decline in biodiversity, but has also triggered land conflicts and deepened poverty among indigenous communities dependent on the forest. This study aims to analyze the relationship between modernization and deforestation in Tamiang, examine the phenomenon through an ecotheological approach, and formulate the contribution of Islamic theological values to environmental conservation efforts. The research employs a qualitative-descriptive method with ecotheological and sociological approaches, relying primarily on literature review techniques (Qur'an, academic journals, and recent news sources). The main theoretical framework is Islamic ecotheology, grounded in the principles of khalifah (vicegerent of God on earth), amanah (trust/responsibility), mizan (balance), and rahmatan lil 'alamin (mercy to all creation). Key findings reveal that modernization has accelerated deforestation through an economic logic that prioritizes short-term profit, while the ecotheological perspective exposes deforestation as a moral and spiritual crisis resulting from humanity's deviation from its role as khalifah. Theoretically, this study enriches contextual ecotheology scholarship in Indonesia; practically, it offers religion-based environmental ethics recommendations for local communities and policy inputs for integrating theological values into sustainable forest management in religiously rooted regions.

Keywords : *Aceh Tamiang, Deforestation, Ecotheology.*

Pendahuluan

Deforestasi merupakan salah satu tantangan lingkungan terbesar di era modernisasi, di mana pembangunan ekonomi sering kali mengorbankan kelestarian hutan. Deforestasi merupakan keadaan berkurangnya luas kawasan hutan akibat alih fungsi lahan untuk pembangunan infrastruktur, pemukiman, kegiatan pertanian, pertambangan, serta Perkebunan (Wahyuni, 2021: 148–162). Di Indonesia, modernisasi yang ditandai dengan ekspansi perkebunan, industri, dan infrastruktur telah menyebabkan hilangnya jutaan hektare hutan, yang tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem tetapi juga memperburuk perubahan iklim global. Proses ini sering kali didorong oleh kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap biodiversitas dan sumber daya alam. Studi menunjukkan bahwa deforestasi di Indonesia fluktuatif, dengan penurunan signifikan pada periode tertentu, namun tetap menjadi ancaman utama bagi keberlanjutan lingkungan. Pendekatan interdisipliner diperlukan untuk mengatasi isu ini, termasuk integrasi perspektif etis dan spiritual.

Kondisi deforestasi di wilayah Aceh Tamiang semakin mengkhawatirkan akibat konversi lahan yang masif selama dua dekade terakhir. Tutupan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang telah tergerus secara signifikan, dengan hilangnya sabana, hutan mangrove, dan lahan hutan primer yang beralih fungsi menjadi permukiman dan perkebunan. Data menunjukkan bahwa pola perubahan lahan paling dominan terjadi antara 1995 hingga 2012, di mana hutan sekunder berubah menjadi belukar dan pertanian, yang mempercepat degradasi ekosistem lokal. Kondisi ini membuat Tamiang rentan terhadap bencana alam seperti banjir, karena hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap air. Penelitian mendalam diperlukan untuk memetakan kerusakan ini secara akurat (Kompas Lestari, 2026, diakses 14 Januari).

Modernisasi melalui ekspansi perkebunan, khususnya kelapa sawit, menjadi faktor pemicu utama deforestasi di Tamiang dan wilayah Aceh secara keseluruhan. Perkebunan sawit telah berkembang pesat sejak era pasca-kemerdekaan, dengan luas lahan yang meningkat secara eksponensial, sering kali mengorbankan hutan alam. Di Indonesia, laju deforestasi mencapai puluhan juta hektare selama periode 1950–2013, di mana pertumbuhan kebun sawit menyumbang sebagian besar konversi lahan. Di Tamiang, alih fungsi ini tidak hanya mengurangi tutupan hutan tetapi juga mengganggu siklus hidrologi lokal, yang memperburuk erosi tanah (Purba, 2017: 81–94). Pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan perkebunan diperlukan untuk mengurangi dampak ini.

Selain perkebunan, modernisasi melalui kegiatan industri dan pembangunan infrastruktur juga mempercepat deforestasi di Tamiang. Aktivitas industri ekstraktif, seperti pertambangan dan pembangunan jalan, telah menjadi faktor dominan sejak era kolonial dan semakin intensif di masa kini, menyebabkan degradasi hutan secara sistematis. Di Indonesia, deforestasi sering kali dimulai dari pembukaan lahan untuk industri besar-besaran, yang tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga memicu konflik lahan dengan masyarakat lokal. Di Aceh Tamiang, infrastruktur pendukung industri telah mengakibatkan fragmentasi hutan, yang memperlemah kemampuan alam dalam menahan bencana (KBA News, 2026, diakses 14 Januari). Regulasi yang lebih ketat terhadap kegiatan industri diperlukan untuk mencegah eskalasi kerusakan.

Dampak ekologis dan sosial dari deforestasi di Tamiang sangat luas, mencakup hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan bencana alam seperti banjir dan longsor, serta perubahan iklim lokal. Secara ekologis, deforestasi menyebabkan erosi tanah, penurunan kualitas air, dan hilangnya habitat satwa liar, sementara secara sosial, ia memicu konflik komunitas, pengungsian, dan penurunan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang bergantung pada hutan. Di Aceh, dampak ini semakin terasa dengan banjir berulang yang merusak permukiman dan pertanian (KBA News, 2026, diakses 14 Januari).

Kerusakan ini tidak hanya mengancam kehidupan sehari-hari tetapi juga warisan budaya masyarakat adat. Upaya restorasi ekosistem harus melibatkan partisipasi masyarakat untuk mitigasi dampak jangka panjang.

Meskipun kajian lingkungan di Tamiang telah banyak dilakukan dari perspektif ilmiah dan ekonomi, minimnya pendekatan teologis dalam studi lokal menjadi celah yang signifikan. Ekoteologi, yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan pelestarian alam, jarang diterapkan dalam konteks Indonesia, padahal krisis ekologi seperti deforestasi memerlukan kerangka etis berbasis spiritual untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Perspektif seperti yang dikemukakan Seyyed Hossein Nasr menekankan bahwa agama dapat menjadi strategi pencegahan krisis lingkungan dengan menjadikan alam sebagai manifestasi ketuhanan (Wasil & Muizudin, 2023: 179–202). Di Tamiang, pendekatan ini bisa memperkaya diskusi lokal yang selama ini didominasi aspek sekuler, sehingga mendorong tanggung jawab kolektif berbasis iman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, bagaimana modernisasi berkontribusi terhadap deforestasi di Tamiang, di mana ekspansi perkebunan dan infrastruktur telah mempercepat konversi lahan hutan menjadi area produktif ekonomi. Kedua, bagaimana perspektif ekoteologi memandang fenomena deforestasi tersebut, dengan menekankan pada ketidakseimbangan antara kemajuan manusia dan tanggung jawab spiritual terhadap alam. Ketiga, apa implikasi teologis dan etis bagi masyarakat dan pemangku kebijakan, termasuk perlunya reformasi kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan untuk mencegah degradasi lingkungan lebih lanjut. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap akar masalah yang sering kali diabaikan dalam kajian konvensional.

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dirancang secara spesifik. Pertama, menganalisis hubungan modernisasi dan deforestasi di Tamiang melalui data empiris tentang perubahan lahan dan faktor pendorongnya. Kedua, mengkaji fenomena deforestasi melalui pendekatan ekoteologi, dengan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip teologis dapat menjadi kerangka interpretasi atas kerusakan ekologis. Ketiga, merumuskan kontribusi nilai-nilai teologis terhadap pelestarian lingkungan, termasuk pengembangan model intervensi berbasis agama untuk restorasi hutan. Tujuan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman holistik yang menggabungkan dimensi sosial, ekonomi, dan spiritual.

Manfaat penelitian ini mencakup aspek teoretis, praktis, dan kebijakan. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya kajian ekoteologi kontekstual di Indonesia dengan menyajikan studi kasus lokal yang mengintegrasikan tradisi keagamaan dengan isu lingkungan kontemporer. Secara praktis, hasilnya dapat memberikan rekomendasi etika lingkungan berbasis agama bagi komunitas di Tamiang, seperti program edukasi spiritual untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam konservasi. Secara kebijakan, penelitian ini menawarkan masukan bagi pengelolaan lingkungan berkelanjutan, termasuk integrasi perspektif teologis dalam regulasi restorasi lahan ilegal (Lembong Misbah, 2024: 1–10). Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada upaya mitigasi deforestasi secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena deforestasi di Tamiang secara mendalam, dengan fokus pada analisis naratif dan konteks sosial-lingkungan. Pendekatan ekoteologis diterapkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai teologis dengan isu ekologis, sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami interaksi masyarakat dengan modernisasi yang memicu degradasi hutan. Kombinasi ini memungkinkan eksplorasi holistik terhadap dampak spiritual dan sosial, di mana data dikumpulkan dan dianalisis secara interpretatif untuk menghasilkan pemahaman yang kontekstual (Caggiano & Weber, 2023: 793–811). Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 30 menegaskan peran manusia sebagai khalifah di bumi, yang mendukung pendekatan ini sebagai tanggung jawab moral terhadap alam.

Lokasi penelitian difokuskan pada Kabupaten Aceh Tamiang, yang dipilih karena tingginya tingkat deforestasi akibat ekspansi perkebunan dan infrastruktur, serta keberagaman masyarakatnya yang kaya akan nilai keagamaan dan budaya lokal. Subjek penelitian meliputi informan kunci seperti tokoh agama (ulama dan pemimpin spiritual), masyarakat lokal (petani dan penduduk terdampak), aktivis lingkungan, serta pemangku kepentingan seperti pejabat pemerintah daerah, yang dipilih melalui purposive sampling untuk mendapatkan perspektif beragam. Pendekatan ini memastikan representasi suara dari berbagai lapisan masyarakat dalam mengungkap dinamika ekologis dan teologis. Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat ayat 13 menekankan keberagaman umat manusia sebagai rahmat, yang relevan dengan pemilihan informan dari berbagai etnis dan peran sosial di Tamiang.

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang mencakup analisis mendalam terhadap Al-Qur'an sebagai sumber primer teologis, jurnal ilmiah terkait deforestasi dan ekoteologi, serta berita terkini tentang kondisi lingkungan di Aceh Tamiang dari sumber terpercaya. Pendekatan ini melibatkan pencarian sistematis dokumen sekunder untuk membangun kerangka konseptual, dengan fokus pada interpretasi ayat-ayat terkait alam dan dampak modernisasi. Data dikumpulkan secara dokumenter untuk memastikan keakuratan dan relevansi dengan isu lokal. Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat 68-69 menggambarkan alam sebagai tanda kebesaran Tuhan, yang menjadi dasar pengumpulan data literatur untuk memahami nilai ekologis dalam Islam (Hossini, 2023: 1–7).

Teknik analisis data mengikuti model kualitatif dengan tahapan reduksi data untuk menyaring informasi esensial, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel tematik, penarikan kesimpulan berdasarkan pola yang muncul, serta analisis tematik berbasis ekoteologi untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual. Proses ini dilakukan secara iteratif untuk memastikan validitas, di mana tema-tema seperti khalifah dan mizan dieksplorasi dalam konteks deforestasi. Analisis ini bertujuan menghasilkan interpretasi mendalam yang menghubungkan data empiris dengan prinsip teologis. Al-Qur'an dalam surat Al-Hashr ayat 21 mengajak manusia merenungkan tanda-tanda alam, yang mendukung analisis tematik sebagai cara menarik kesimpulan etis dari data lingkungan.

Hasil dan Pembahasan

1. Dinamika Deforestasi Di Tamiang

Dinamika deforestasi di wilayah Aceh Tamiang memperlihatkan karakteristik yang berlapis dan saling terkait, dengan bentuk serta pola perubahan tutupan hutan yang semakin kompleks dari waktu ke waktu. Sejak dekade 1990-an, alih fungsi hutan primer menjadi kawasan Perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit serta permukiman penduduk telah menjadi pola yang paling dominan. Proses ini tidak berlangsung secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan yang berkelanjutan, sehingga memicu fragmentasi kawasan hutan dalam skala yang semakin luas. Fragmentasi tersebut ditandai oleh menyusutnya hutan sekunder akibat pembukaan lahan secara bertahap yang didorong oleh kepentingan ekonomi dan peningkatan kebutuhan lahan produktif.

Dalam praktiknya, deforestasi di Aceh Tamiang kerap berlangsung secara ilegal, antara lain melalui aktivitas pembalakan liar yang tidak terkendali, yang pada akhirnya mempercepat degradasi lingkungan. Secara spasial, pola deforestasi cenderung terkonsentrasi di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang yang memiliki tingkat kerentanan ekologis tinggi, sehingga kerusakan hutan di wilayah ini berkontribusi besar terhadap ketidakseimbangan ekosistem lokal (Urfan, 2025: 1–10). Akibatnya, berbagai ekosistem penting seperti hutan mangrove dan kawasan sabana mengalami penyusutan yang signifikan dan sulit dipulihkan.

Aktor-aktor yang terlibat dalam proses deforestasi di Aceh Tamiang terdiri atas beragam pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Di antaranya adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit berskala besar, petani kecil independen, serta pemerintah daerah yang berperan dalam pemberian izin konversi lahan. Perusahaan perkebunan, termasuk yang memiliki keterkaitan dengan jaringan multinasional, sering kali menjadi aktor utama melalui penguasaan lahan dalam

skala luas, meskipun sebagian di antaranya telah mengusung komitmen zero-deforestation. Namun demikian, rendahnya tingkat keterlibatan dan pembinaan terhadap petani independen dalam rantai pasok perkebunan sawit menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan struktural. Di sisi lain, masyarakat adat dan kelompok aktivis lingkungan hadir sebagai aktor yang berupaya mempertahankan kelestarian hutan serta hak-hak sosial budaya, meskipun posisi mereka sering kali terpinggirkan (Eggen, 2024: 1–23). Kehadiran aktor ilegal, seperti pembalok liar dan perambah hutan, semakin memperumit kondisi dan mempercepat laju kerusakan hutan, sebagaimana terlihat jelas dari tumpukan kayu gelondongan besar yang terseret banjir bandang di sekitar Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, Desa Tanjung Karang, Karang Baru, Aceh Tamiang,



Gambar 1. Tumpukan kayu gelondongan pasca-banjir di Pesantren Darul Mukhlisin Aceh Tamiang pada 10 Desember 2025 sebagai bukti pembalakan liar (Liputan6.com, 2025, diakses 11 Desember).



Gambar 2. Tumpukan kayu gelondongan di jalan Aceh Tamiang pasca-banjir pada 10 Desember 2025 sebagai bukti pembalakan liar (Liputan6.com, 2025, diakses 11 Desember).

Dari dua gambar di atas dapat dilihat bahwa kayu-kayu tersebut menutupi area luas, menyumbat akses jalan, dan menjadi bukti visual degradasi hutan lindung akibat penebangan tidak berizin di hulu Sungai Tamiang. Keseluruhan dinamika ini mencerminkan adanya konflik kepentingan yang tajam antara orientasi ekonomi jangka pendek dan upaya pelestarian lingkungan jangka panjang.

Dampak deforestasi di Aceh Tamiang tidak hanya terbatas pada aspek ekologis, tetapi juga meluas ke dimensi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Secara ekologis, deforestasi

menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati, meningkatnya erosi tanah, serta bertambahnya frekuensi dan intensitas bencana banjir akibat hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga alami. Kerusakan ini turut mengancam kelangsungan habitat satwa endemik yang dilindungi, seperti orangutan dan harimau Sumatra, serta meningkatkan emisi karbon yang berkontribusi terhadap percepatan perubahan iklim global. Sementara itu, dari sisi sosial, deforestasi memicu konflik penguasaan lahan, memperdalam kemiskinan di kalangan masyarakat adat, serta menghilangkan sumber mata pencaharian tradisional yang bergantung pada keberlanjutan hutan (Friends of the Earth International, 2020: 97). Penggusuran dan marginalisasi komunitas lokal yang terjadi secara berulang memperparah ketimpangan ekonomi dan melemahkan identitas budaya masyarakat Aceh Tamiang secara keseluruhan.

2. Modernisasi Sebagai Faktor Pendorong

Istilah-istilah seperti *modern* (abad modern), *modernity* atau modernitas (kemodernan), *modernism* (paham kemodernan), serta *modernization* atau modernisasi (proses modernisasi) dalam konteks Islam pada dasarnya diserap dari bahasa dan konsep Barat. Istilah-istilah tersebut mulai masuk ke dunia Islam bersamaan dengan penyebaran pengaruh kebudayaan Barat ke wilayah Timur, terutama setelah dipopulerkan oleh para orientalis. Para orientalis menggunakan istilah-istilah ini untuk menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai lembaga sosial, adat istiadat, dan aspek kehidupan lainnya di masyarakat Muslim, yang membawa nuansa kondisi baru. Kata *modern* sendiri mengandung makna sesuatu yang baru (*new*) sebagai lawan dari yang lama atau kuno (*ancient*) (Harahap, 2017: 74).

Proses modernisasi yang berlangsung di wilayah Aceh Tamiang, khususnya melalui ekspansi perkebunan dan industri kelapa sawit, telah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong laju deforestasi secara signifikan. Orientasi pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi menjadikan kawasan hutan sebagai sasaran utama konversi lahan dalam skala besar, terutama untuk pengembangan perkebunan sawit yang dianggap memiliki nilai ekonomi tinggi (Friends of the Earth International, 2020: 97). Dinamika ini tidak terlepas dari meningkatnya permintaan global terhadap minyak sawit sebagai komoditas strategis dalam industri pangan, energi, dan kosmetik, yang mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk menguasai dan mengalihfungsikan lahan hutan tanpa memperhitungkan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. Ironisnya, modernisasi yang kerap dipahami sebagai simbol kemajuan dan kesejahteraan justru berkontribusi terhadap percepatan degradasi ekologis, terutama ketika praktik pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara eksploitatif. Upaya mitigasi melalui instrumen seperti sertifikasi sukarela sawit berkelanjutan belum menunjukkan efektivitas yang optimal, sehingga belum mampu menahan laju kerusakan hutan secara nyata.

Selain ekspansi perkebunan, pembangunan infrastruktur fisik seperti jaringan jalan, fasilitas industri, dan sarana pendukung lainnya turut berperan dalam mempercepat proses alih fungsi lahan di Aceh Tamiang. Modernisasi infrastruktur membuka akses ke kawasan hutan yang sebelumnya relatif terisolasi, sehingga mempermudah aktivitas pembukaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam. Dalam banyak kasus, pembangunan ini memperoleh legitimasi melalui kebijakan pemerintah daerah yang lebih memprioritaskan peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan. Akibatnya, pertimbangan ekologis sering kali terpinggirkan, sementara dampak jangka panjang terhadap keseimbangan ekosistem lokal kurang diperhitungkan. Kondisi ini memicu peningkatan fragmentasi hutan, di mana kawasan hutan yang tersisa terpecah-pecah dan kehilangan fungsi ekologisnya, sementara lahan yang semula produktif secara ekologis berubah menjadi kawasan industri dan perkebunan yang minim keberlanjutan lingkungan (State of the Apes, 2018: 88–92).

Logika ekonomi yang mendasari proses modernisasi di Aceh Tamiang kerap berada dalam posisi yang berseberangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Penekanan pada keuntungan ekonomi jangka pendek mendorong eksploitasi sumber daya alam secara intensif, tanpa mempertimbangkan nilai ekologis dan sosial hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat

lokal. Pendekatan ini cenderung mengabaikan peran hutan dalam menjaga keseimbangan iklim, keanekaragaman hayati, serta keberlangsungan mata pencaharian tradisional. Sementara itu, berbagai kebijakan yang berlabel ramah lingkungan, seperti sertifikasi sawit berkelanjutan dan inisiatif hijau lainnya, masih menghadapi tantangan serius dalam implementasi, mulai dari lemahnya pengawasan hingga rendahnya kepatuhan aktor-aktor ekonomi (Pramudya, 2018: 920–940). Oleh karena itu, konflik antara logika ekonomi modernisasi dan agenda keberlanjutan menuntut adanya reformasi kebijakan yang lebih komprehensif dan inklusif, guna menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup dalam jangka panjang.

3. Analisis Ekoteologis Terhadap Deforestasi

Analisis ekoteologis menunjukkan bahwa krisis ekologis seperti deforestasi di Tamiang bukan hanya masalah teknis, melainkan krisis moral dan spiritual yang berakar pada hilangnya kesadaran akan kesakralan alam sebagai ciptaan Tuhan. Dalam perspektif Islam, kerusakan lingkungan mencerminkan ketidakseimbangan batin manusia yang memisahkan diri dari nilai-nilai ilahi, di mana eksploitasi alam dianggap sebagai manifestasi dari krisis spiritual yang lebih dalam (Murad, 2012: 118–138). Pendekatan ini menekankan bahwa solusi ekologis harus dimulai dari pemulihan hubungan spiritual antara manusia dan alam, bukan sekadar kebijakan sekuler. Seperti dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya : "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (Q.S. Al-A'raf: 56).

Penyimpangan peran manusia sebagai khalifah (wakil Tuhan di bumi) terlihat sangat jelas dalam fenomena deforestasi di Aceh Tamiang. Di sini, manusia gagal menjalankan amanah untuk melestarikan alam dan justru menjadi penyebab utama degradasi melalui eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya hutan. Konsep khalifah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, menempatkan manusia sebagai pengelola yang bertanggung jawab, adil, dan penuh kehati-hatian, bukan sebagai penguasa destruktif yang memprioritaskan kepentingan pribadi atau ekonomi semata. Aqidah Islam memberikan dasar moral dan etika yang kokoh bagi seorang Muslim (Siregar et al., 2026: 20–30), di mana keyakinan akan pertanggungjawaban di hadapan Allah mendorong sikap menjaga keseimbangan alam (mizan) dan menghindari kerusakan (fasad fil-ardh). Namun, gelombang modernisasi sering kali memupuk sikap antroposentris yang mengabaikan dimensi spiritual ini, sehingga eksploitasi hutan untuk perkebunan dan industri menjadi pilihan yang tampak rasional secara ekonomi, padahal secara teologis merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah ilahi. Analisis ini mengungkap bahwa penyimpangan tersebut bukan hanya etis, tetapi juga teologis, karena melupakan peran manusia sebagai pelindung ciptaan Tuhan. Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbeeh dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (Q.S. Al-Baqarah: 30).

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT menetapkan manusia sebagai khalifah di muka bumi, yaitu sebagai wakil dan pengelola yang diberi amanah untuk mengatur, memelihara, dan menjaga keberlangsungan kehidupan di dalamnya.

Ketimpangan antara eksploitasi alam dan tanggung jawab etis dalam ekologi Islam muncul ketika modernisasi memprioritaskan keuntungan ekonomi di atas keseimbangan alam, seperti yang terjadi di Tamiang dengan konversi hutan menjadi perkebunan. Etika Islam menolak eksploitasi berlebih dan mendorong pendekatan holistik yang mengakui alam sebagai bagian dari tanggung jawab moral

manusia, di mana ketimpangan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan keseimbangan (Wani, 2024: 1–8). Pendekatan ini menekankan perlunya keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian untuk menghindari krisis ekologis lebih lanjut. Al-Qur'an dalam surat Ar-Rahman ayat 8-9.

أَلَا تَطْعَمُونَ فِي الْمِيزَانِ ۙ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۙ

Artinya : “Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (Q.S. Ar-Rahman: 8–9)”

Ayat ini mengandung perintah yang tegas kepada manusia untuk senantiasa menjaga keseimbangan (mīzān) yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam tatanan kehidupan dan alam semesta, serta larangan keras untuk merusak atau melanggarnya. Konsep keseimbangan tersebut tidak hanya mencakup aspek fisik dan ekologis, tetapi juga dimensi moral, sosial, dan spiritual yang saling berkaitan.

4. Implikasi Etika Dan Teologis

Rekonstruksi kesadaran ekologis masyarakat di Tamiang memerlukan integrasi nilai-nilai agama untuk membangun kembali hubungan harmonis antara manusia dan alam, di mana gerakan sosial berbasis keagamaan dapat menciptakan praktik lingkungan baru melalui kreativitas religius. Pendekatan ini melibatkan penggabungan ajaran resmi Islam dengan pengetahuan lokal untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menghadapi deforestasi. Implikasinya adalah pembentukan kesadaran kolektif yang melihat alam sebagai bagian dari ibadah, sehingga rekonstruksi ini menjadi alat untuk adaptasi lingkungan yang berkelanjutan. Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 70 :

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۙ

Artinya : “Dia berkata: "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu". (Q.S. Al-Isra: 70)

Ayat Ini menyatakan bahwa Allah telah memuliakan manusia, yang menyiratkan tanggung jawab untuk membangun kesadaran ekologis sebagai bentuk penghormatan terhadap ciptaan-Nya.

Peran agama dalam pelestarian lingkungan di konteks Islam menekankan bahwa keyakinan religius dapat menjadi pendorong kuat untuk perilaku pro-lingkungan, seperti di Tamiang di mana ajaran tentang khalifah dan rahmah mendorong konservasi sebagai bentuk ibadah. Agama berfungsi sebagai kerangka etis yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual untuk melindungi alam, di mana pemimpin agama bertugas sebagai agen keadilan ekologis (Abd Rahman, 2021: 1755–1772). Implikasi teologisnya adalah penguatan norma sosial melalui agama untuk mengatasi krisis lingkungan secara holistik. Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat 38 :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۙ

Artinya : “Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.” (Q.S. Al-An'am: 38)

Ayat ini menegaskan bahwa seluruh makhluk hidup, baik manusia maupun makhluk lainnya, dipandang sebagai umat yang memiliki kedudukan dan keberadaan yang setara di hadapan Tuhan. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan tidak hanya berpusat pada manusia semata, melainkan mencakup seluruh ciptaan yang memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam tatanan alam.

Integrasi nilai ekoteologi dalam pembangunan berkelanjutan di Tamiang memerlukan kebijakan yang menggabungkan etika integral dari perspektif agama, di mana nilai-nilai seperti penatagunaan planet dan interkoneksi bio menjadi dasar untuk perubahan sistemik. Pendekatan ini mendorong metodologi transdisipliner yang mengintegrasikan wawasan keagamaan untuk governance lingkungan yang lebih inklusif. Memberikan implikasi berupa pembentukan kebijakan

yang holistik, di mana ekoteologi menjadi panduan untuk pembangunan yang menghormati kesakralan alam (Zepeda, 2025: 102–113).

Penutup

Deforestasi di Aceh Tamiang merupakan dampak langsung dari modernisasi, dengan pola konversi hutan primer menjadi perkebunan sawit dan infrastruktur yang melibatkan aktor seperti perusahaan industri, petani, dan pemerintah daerah. Dampak ekologis mencakup erosi tanah, banjir, dan hilangnya biodiversitas, sementara dampak sosial meliputi konflik lahan dan kemiskinan masyarakat adat. Dari perspektif ekoteologis, deforestasi dianggap sebagai krisis moral dan spiritual, di mana manusia menyimpang dari peran sebagai khalifah, menciptakan ketimpangan antara eksploitasi ekonomi dan tanggung jawab etis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi literatur dan analisis tematik berbasis ekoteologi, yang mengungkap perlunya rekonstruksi kesadaran ekologis melalui integrasi nilai agama dalam pembangunan berkelanjutan.

Modernisasi berkontribusi terhadap deforestasi di Tamiang melalui ekspansi perkebunan sawit, industri, dan infrastruktur, yang didorong oleh logika ekonomi yang mengabaikan keberlanjutan, sehingga mempercepat degradasi hutan dan siklus hidrologi. Perspektif ekoteologi memandang fenomena deforestasi sebagai penyimpangan spiritual, di mana krisis ekologis mencerminkan kegagalan manusia dalam menjaga amanah dan mizan sebagai wakil Tuhan, dengan prinsip seperti rahmatan lil alamin yang menuntut pelestarian alam sebagai bentuk ibadah. Implikasi teologis dan etis bagi masyarakat dan pemangku kebijakan meliputi rekonstruksi kesadaran ekologis berbasis agama, peran pemimpin spiritual dalam advokasi lingkungan, serta integrasi nilai ekoteologi dalam kebijakan untuk mencapai pembangunan yang holistik dan adil.

Kontribusi studi ini terhadap kajian ekoteologi terletak pada pengayaan konteks lokal Indonesia, khususnya Aceh Tamiang, dengan mengintegrasikan prinsip Islam seperti khalifah, amanah, dan mizan ke dalam analisis krisis ekologis, yang selama ini didominasi pendekatan sekuler. Studi ini memperluas aplikasi ekoteologi sebagai alat rekonstruksi etika lingkungan, menyediakan model praktis untuk masyarakat berbasis agama dalam menghadapi modernisasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang transdisipliner untuk pelestarian hutan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat peran ekoteologi sebagai jembatan antara teologi dan ekologi, mendorong kajian lebih lanjut tentang integrasi nilai spiritual dalam manajemen lingkungan berkelanjutan di wilayah berbasis agama.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Caggiano, H., & Weber, E. U. (2023). Advances in qualitative methods in environmental research. *Annual Review of Environment and Resources*, 48, 793–811.

Eggen, M. (2024). Smallholder participation in zero-deforestation supply chain initiatives in the Indonesian palm oil sector: Challenges, opportunities, and limitations. *Elementa: Science of the Anthropocene*, 12(1), 1-23.

Friends of the Earth International. (2020). *Losing ground: The human rights impacts of oil palm plantation expansion in Indonesia*. Retrieved from <https://www.foei.org/wp-content/uploads/2020/12/losingground.pdf>

Harahap, S. (2017). *Islam & modernitas: Dari teori modernisasi hingga penegakan kesalehan modern*. Medan: Prenada Media.

- Hossini, H. (2023). The environment from the perspective of the Qur'an and divine teachings. *Health Rep Technol*, 9(2), 1-7.
- KBA News. (2026, January 13). *Kegiatan industri faktor terbesar dalam deforestasi di Indonesia*. Retrieved from <https://kbanews.com/hot-news/kegiatan-industri-faktor-terbesar-dalam-deforestasi-di-indonesia/>
- Kompas Lestari. (2026, January 6). *Tutupan hutan DAS Tamiang Aceh tergerus sawit dan permukiman selama 20 tahun*. Retrieved from <https://lestari.kompas.com/read/2026/01/06/183500586/tutupan-hutan-das-tamiang-aceh-tergerus-sawit-dan-permukiman-selama-20-tahun?page=all>
- Liputan6.com. (2025, December 11). *Dua pekan pasca bencana banjir bandang Sumatera, seperti ini potret Aceh Tamiang*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/photo/read/6233781/dua-pekan-pasca-bencana-banjir-bandang-sumatera-seperti-ini-potret-aceh-tamiang?page=1>
- Misba, T. L. (2024). Harmonisasi kehutanan dan sinergi hukum adat: Evaluasi kebijakan pemulihan dan pemberdayaan masyarakat pada restorasi eks lahan sawit ilegal di Aceh. *Journal of Law and Economics*, 3(1), 1-10.
- Murad, M. M. (n.d.). Inner and outer nature: An Islamic perspective on the environmental crisis. *Islam & Science*, 10(2), 118-138.
- Primasari, R. (2025, December 22). *Deforestasi di Aceh dan dampaknya bagi lingkungan dan kehidupan*. Kompasiana. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/rositaprimasari2628/6948a51fc925c45d1c2f2604/deforestasi-di-aceh-dan-dampaknya-bagi-lingkungan-dan-kehidupan?l=c>
- Pramudya, E. P. (2018). The disciplining of illegal palm oil plantations in Sumatra. *Third World Quarterly*, 39(5), 920-940.
- Purba, J. H. V. (2017). Perkebunan kelapa sawit Indonesia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia*, 43(1), 81-94.
- Rahman, N. A. (2021). Awareness of the role of “religious people” in environmental conservation from the perspective of Islamic studies students. *Creative Education*, 12, 1755-1772.
- Siregar, P., Harahap, S., & Harahap, E. W. (2026). Aqidah dan kemanusiaan. *SanthET: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, 9(1), 20-30.
- State of the Apes. (2018). *State of the apes: An annual report on the state of the apes* (pp. 88–92). Retrieved from <https://www.stateoftheapes.com/wp-content/uploads/2018/11/SotA3-Composite-WEB.pdf>
- Urfan, F. (2025). Mapping deforestation in the Tamiang watershed through NDVI analysis of Sentinel-2 imagery based on Google Earth Engine. *Indonesian Journal of Geography Information Science*, 1(2), 1-10.
- Wahyuni, H., & Suranto. (2021). Dampak deforestasi hutan skala besar terhadap pemanasan global di Indonesia. *JIIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 148-162. doi:10.14710/jiip.v6i1.10083
- Wani, N. H. (2024). Islamic environmental ethics: Preserving the sacred balance. *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, 6(3), 1-8.
- Wasil, M. (2023). Ekoteologi dalam menyikapi krisis ekologi di Indonesia perspektif Seyyed Hossein Nasr. *Refleksi*, 22(1), 179-202.
- Zepeda, C. (2025). Integrating the ethics of integral ecologies into global environmental governance. *Journal of Global Ethics*, 21(1), 102–113.

